

EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR

Wahdania Amalia Rosa

NPP. 32.0567

Asdaf Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur

Program Studi Keuangan Publik

Email: wahdaniarosa@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Budi Margono., S.Pd, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian): The author focuses on the problem of using the Regional Government Information System in regional financial management in Tulungagung Regency, East Java Province, which affects the results of existing government performance due to its ineffective use so that good governance is not achieved. **Purpose:** The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of SIPD implementation in regional financial management in Tulungagung Regency. **Method:** This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation which are analyzed using Duncan's (2020) theory of effectiveness which includes 3 dimensions, namely goal achievement, integration, and adaptation. **Result:** The findings obtained by researchers in this study are that the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Tulungagung Regency cannot be said to be effective. There are several obstacles that affect the implementation of this Local Government Information System (SIPD) which are not yet effective, including the application of SIPD has not been fully implemented at the administration and accounting reporting stages, the Ministry of Home Affairs Pusdatin to local governments throughout Indonesia is minimally carried out and the system often experiences errors. **Conclusion:** The implementation of the Regional Government Information System (SIPD) in regional financial management in Tulungagung Regency, East Java Province cannot be said to be effective. **Keywords:** SIPD; Effectiveness; Regional financial management

1956

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Peneliti berfokus pada permasalahan penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur yang berpengaruh terhadap hasil kinerja pemerintah yang ada dikarenakan penggunaannya yang belum efektif sehingga tidak tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Tulungagung. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan teori efektivitas Duncan(2020) yang mencakup 3 dimensi yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh peneliti

dalam penelitian ini yaitu penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah(SIPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(BPKAD) Kabupaten Tulungagung belum dapat dikatakan efektif. Terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah(SIPD) ini belum efektif diantaranya penerapan SIPD ini belum sepenuhnya diterapkan pada tahap penatausahaan dan akuntansi pelaporan, Pusdatin Kemendagri kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia minim dilakukan serta sistem yang sering mengalami *error*. **Kesimpulan:** Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah(SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa timur belum dapat dikatakan efektif.

Kata kunci: SIPD; Efektivitas; Pengelolaan keuangan daerah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah menerapkan asas desentralisasi pada pemerintahannya. Pendelegasian wewenang pemerintah pusat berupa hak otonomi daerah mempunyai tujuan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pusat (Tumija & Rachmadika, 2024). Asas desentralisasi, kekuasaan dari pemerintah pusat dilimpahkan ke pemerintah daerah seperti provinsi, kabupaten, atau kota yang memiliki tanggung jawab dalam berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sistem desentralisasi yang diterapkan di Indonesia menjadikan adanya pemberian kewenangan pada daerah untuk mengelola pemerintahannya sendiri (Talitha et al., 2020). Pemberian otonomi daerah ini juga memiliki tujuan untuk mempercepat proses dalam pertumbuhan pemerataan pembangunan wilayah (Muqoyyidin, 2016).

Sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya keuangan yang bertujuan memperbaiki pelayanan publik dan meningkatkan kemandirian daerah dalam pengelolaan keuangan. Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi merupakan tahapan dalam pengelolaan keuangan daerah (Pentoria et al., 2023). Pelaksanaan anggaran yang mengaitkan setiap biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diharapkan, sehingga anggaran tidak hanya sebagai alat pengeluaran, tetapi sebagai instrument dalam pengukuran kinerja instansi untuk mencapai setiap program pembangunan yang direncanakan. Perencanaan program-program pembangunan menggunakan teknologi digital sebagai alat bantu merupakan cara yang tepat, efektif dan efisien dalam pengelolaan pemerintahan daerah (Luo et al., 2023).

Electronic government atau dikenal sebagai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan upaya atau cara dalam proses meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan secara mudah dan meningkatkan kepuasan masyarakat (Hong & Choi, 2018). Teknologi ini memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat, serta urusan lain yang berkaitan dengan pemerintahan Dengan melakukan manajemen keuangan publik, dapat menghasilkan dan mengendalikan sumber daya keuangan publik untuk pelayanan publik yang efektif (Hartono et al., 2023).

Salah satu ruang lingkup SIPD yaitu tentang informasi keuangan daerah. Sebagian besar OPD telah menerapkan SIPD ini untuk memastikan bahwa informasi keuangan dan administrasi dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dan pemerintah pusat. Sistem informasi pemerintahan daerah(SIPD) ini dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah (Vitriana et al., 2022). Tersedianya sistem khusus pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ini untuk menghasilkan laporan keuangan

yang akurat dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku dalam memudahkan proses kegiatan pemeriksaan atau audit. Penerapan sistem informasi ini di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur membantu efektivitas dan efisiensi suatu laporan keuangan dalam menciptakan akuntabilitas.

Pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2011-2020 menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah atau SIKD yang juga merupakan produk dari Kementerian Dalam negeri, kemudian pada tahun anggaran 2020 sampai 2024 diterapkannya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Namun pada pelaksanaan sistem ini terdapat beberapa kendala yang harus dan perlu dievaluasi kembali oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung yang mencakup jaringan server tidak mendukung dalam melakukan pelayanan sehingga menghambat kinerja, proses penginputan data sering mengalami keterlambatan karena sering terjadi *updating system* serta SIPD masih dalam pengembangan jadi sistem sering mengalami *error*.

Permasalahan penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah tersebut berpengaruh terhadap hasil kinerja pemerintah yang ada dikarenakan penggunaannya yang belum efektif sehingga tidak tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu penelitian mengenai penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Kabupaten Tulungagung masih sedikit yang meneliti sehingga peneliti tertarik untuk melihat seberapa efektif penggunaan maupun pengelolaan keuangan daerah menggunakan sistem informasi pemerintahan daerah atau yang biasa disebut SIPD. Berdasarkan uraian yang ada diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul “Efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur”

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Peneliti berfokus pada permasalahan pada aplikasi SIPD di Kabupaten Tulungagung yang mencakup jaringan server tidak mendukung dalam melakukan pelayanan sehingga menghambat kinerja, proses penginputan data sering mengalami keterlambatan karena sering terjadi *updating system* serta SIPD masih dalam pengembangan jadi sistem sering mengalami *error*. Permasalahan penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah tersebut berpengaruh terhadap hasil kinerja pemerintah yang ada dikarenakan penggunaannya yang belum efektif sehingga tidak tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, diperlukan sebuah penelitian lebih lanjut untuk memahami kendala yang ada serta mengukur efektivitas program secara mendalam, sehingga diharapkan terjadi peningkatan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Penelitian Manoe et. al dengan judul Analisis Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka (Manoe et al., 2023), menemukan bahwa penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) khususnya bidang anggaran efektif diterapkan dalam pelaksanaan, perencanaan, pengelolaan anggaran Kabupaten Sikka. Penelitian Vitriana & Ahyaruddin menemukan bahwa Penggunaan SIPD di BPKAD Kota Pekanbaru dalam pengelolaan keuangan daerah belum efektif (Vitriana et al., 2022). Penelitian Adisi & Sadad menemukan bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hulu belum cukup efektif masih memerlukan aplikasi pendamping dalam beberapa prosesnya (Adisi & Sadad, 2022). Penelitian Balqis & Fadhly menemukan bahwa. Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang diterapkan Dinas Transmigrasi serta Tenaga Kerja menciptakan informasi data yang efektif dan efisien (Balqis & Fadhly, 2021). Penelitian Tumija et. al. menemukan bahwa Implementasi SIPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Semarang, sudah terlaksana, namun ada beberapa hambatan dalam penerapan SIPD (Tumija et al., 2023).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana fokus penelitian yang dilakukan yakni SIPD dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur. Sedangkan penelitian Manoe et al. (2023) berfokus penerapan SIPD bidang anggaran saja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Manoe et al. (2023) yang menggunakan metode penelitian kuantitatif. Selain itu pengukuran efektivitas SIPD yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Duncan dalam Steers (2020) yang menyatakan bahwa efektivitas dapat diukur dalam tiga aspek, antara lain pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Hal tersebut berbeda dengan penelitian dari Vitriana et al (2022), Adisi & Sadad (2022), Balqis & Fadhly (2021) dan Tumija et al. (2023) yang menggunakan teori sistem informasi manajemen dari Laudon.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat serta upaya mengatasi hambatan yang ada.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena secara realistis dan nyata. Creswell menjelaskan bahwa penelitian dengan metode ini dilaksanakan secara langsung di lapangan atau pada objek penelitian, data terbuka, analisis teks atau gambar, penyajian informasi dalam bentuk visual seperti gambar dan tabel, serta interpretasi pribadi terhadap temuan yang berkontribusi terhadap metode penelitian kualitatif (Creswell, 2013).

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap 6 orang informan yang terdiri Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala bidang perencanaan anggaran, Kepala bidang perbendaharaan daerah, Staf bidang perencanaan dan penganggaran, Kepala bidang akuntansi dan pelaporan keuangan serta Staf bidang perbendaharaan. Penentuan informan tersebut menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun analisis data pada penelitian kali ini menggunakan model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018) yang terdiri dari tahapan reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan/verifikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur

Peneliti menggunakan teori efektivitas dari Richard M. Steers sebagai analisis fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan yang relevan dengan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Beberapa dimensi dan indikator yang dapat digunakan dalam menganalisis fenomena yang terjadi di lapangan adalah sebagai berikut:

3.1.1. Pencapaian Tujuan

Peneliti melakukan penilaian terhadap dimensi pencapaian tujuan melalui beberapa indikator. Indikator pertama yaitu kurun waktu pencapaian sistem. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Sekretaris dan Kabid Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Kabupaten Tulungagung menunjukkan bahwa SIPD mulai digunakan BPKAD Kabupaten Tulungagung sejak tahun 2021 yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Berdasarkan hal tersebut, pada indikator ini dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung saat ini mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam proses pengelolaan keuangannya.

Indikator selanjutnya pada dimensi ini yaitu target perencanaan dan penganggaran sistem. Observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa akses sistem perencanaan penganggaran pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah mengalami hambatan, yang terlihat dari tingginya frekuensi gangguan teknis atau *error*. Wawancara dengan staf bidang perencanaan dan penganggaran sistem pada BPKAD Kabupaten Tulungagung menunjukkan bahwa kendala yang terjadi dalam proses perencanaan dan penganggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung banyak disebabkan karena faktor eksternal yaitu ketika banyak perangkat daerah yang mengakses sistem secara bersamaan, yang mengakibatkan terjadinya *error* atau gangguan teknis. Berdasarkan hal tersebut, pada indikator ini dapat disimpulkan bahwa target perencanaan dan penganggaran sistem masih belum baik.

Indikator selanjutnya yaitu target akuntansi dan pelaporan sistem. Wawancara dengan Kepala bidang perbendaharaan dan kas daerah BPKAD Kabupaten Tulungagung menunjukkan bahwa proses akuntansi dan pelaporan dalam SIPD sudah diterapkan sejak tahun 2023 namun terkadang mengalami kendala karena mungkin masih penyesuaian dengan sistem. Kendala yang terjadi karena Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ini faktornya bisa bermacam-macam diantaranya ada pada faktor internal dari Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung dan eksternal dari pusat. Berdasarkan hal tersebut, pada indikator ini dapat disimpulkan bahwa target akuntansi dan pelaporan sistem masih belum baik.

Indikator selanjutnya yaitu dasar hukum penerapan sistem. Ditunjukkan melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 130/736/SJ yang mengatur tentang percepatan Implementasi SIPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 yang menjadi pedoman dalam percepatan penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah agar seluruh organisasi perangkat daerah di Indonesia wajib menggunakan sistem ini yang berguna mengintegrasikan seluruh informasi pemerintahan baik dalam pembangunan, keuangan dan informasi lainnya.

Indikator selanjutnya yaitu strategi pencapaian tujuan. Wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan menunjukkan bahwa dalam mencapai tujuan dari SIPD membutuhkan sebuah pelatihan agar para aparatur dapat menguasai SIPD dengan baik. Akan tetapi, pelatihan yang dibutuhkan baru dilaksanakan sekali melalui *zoom meeting*, sehingga dianggap belum efektif. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung tersebut belum efektif mencapai tujuan dengan baik.

Dimensi pencapaian tujuan pada penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur belum dapat dianggap efektif. Hal ini disebabkan karena indikator pada target akuntansi dan pelaporan yang hasil akhirnya yaitu penyusunan laporan keuangan belum tercapai.

3.1.2. Integrasi

Integrasi merupakan dimensi dalam mengukur suatu kegiatan atau program agar berjalan dengan efektif dan efisien, yang melibatkan penyesuaian antara berbagai elemen, sumber daya, serta pihak yang terlibat. Pada dimensi ini diukur melalui indikator prosedur penggunaan SIPD efektif. Wawancara dengan Sekretaris BPKAD Kabupaten Tulungagung menunjukkan bahwa pelatihan prosedur yang dilakukan oleh pusat hanya sebatas video tutorial *Youtube*. Hal ini menunjukkan bahwa pengaplikasian Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ini pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung ini belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Hal ini terjadi karena kurangnya pelatihan dari pemerintah pusat terkait pengaplikasian Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ini.

Indikator selanjutnya yaitu analisis perencanaan sistem berjalan efektif. Observasi yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa sistem *error* pada saat menambahkan kegiatan di tahap perencanaan penganggaran, hal ini disebabkan karena sedang terjadi *update system*. Wawancara dengan staf bidang perencanaan dan penganggaran menunjukkan bahwa masih dibutuhkan aplikasi pendamping dalam tahap penatausahaan dan akuntansi pelaporan. Berdasarkan hal tersebut, indikator analisis perencanaan sistem pada penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung belum terlaksana dengan efektif dan optimal.

Dimensi integrasi pada penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur belum dapat dianggap efektif. Hal ini disebabkan karena indikator prosedur penggunaan SIPD efektif dan analisis perencanaan sistem berjalan efektif masih belum tercapai dengan baik.

3.1.3. Adaptasi

Adaptasi merupakan dimensi yang mengukur proses penyesuaian terhadap lingkungan yang baru, hal ini berkaitan dengan suatu organisasi dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman yang terjadi. Indikator pada dimensi ini berkaitan dengan sarana dan prasarana dalam penerapan SIPD. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa setiap ruangan terdapat komputer dan tersedia jaringan internet yang memadai untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah. Namun hambatan berupa gangguan server dari pusat, mengakibatkan tidak dapat diaksesnya SIPD.

Indikator selanjutnya yaitu monitoring kesesuaian program. Pada penelitian ini ditemukan bahwa monitoring kesesuaian program di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung dilakukan dengan mengundang organisasi perangkat daerah untuk dilakukan penyesuaian dan pencocokan data keuangan atau rekonsiliasi angka yang diinput pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dimensi adaptasi pada penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur sudah baik. Hal ini disebabkan karena indikator sarana dan prasarana serta monitoring kesesuaian program sudah berjalan dengan baik.

3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung SIPD dalam meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur antara lain telah tersedianya sumber daya manusia dan sarana dan prasarana dalam menunjang penerapan SIPD. Selain itu, adanya kewajiban dari pusat terkait

penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ini untuk mengintegrasikan segala bentuk informasi pemerintahan salah satunya terkait pengelolaan keuangan daerah juga menjadi faktor pendukung dalam penerapan SIPD di Kabupaten Tulungagung.

Adapun yang menjadi faktor penghambat SIPD dalam meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur antara lain kurangnya pemahaman pegawai terkait pengaplikasian sistem ini, karena sistem ini masih tergolong baru dan masih memerlukan penyesuaian kembali. Selain itu, kurangnya respon dari pemerintah pusat terhadap permasalahan yang terjadi di daerah juga menjadi faktor penghambat dalam penerapan SIPD di Kabupaten Tulungagung.

3.3 Upaya Mengatasi Hambatan

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat dibagi menjadi dua, yaitu upaya langsung dan tidak langsung. Upaya langsung yang dilakukan yaitu monitoring evaluasi kepada organisasi perangkat daerah lain untuk mengatasi permasalahan yang ada serta membangun koordinasi baik dengan Kemendagri serta provinsi lain secara langsung dalam mengatasi permasalahan yang sama terkait penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sedangkan upaya tidak langsung yang dilakukan yaitu mempelajari modul-modul tahapan pengelolaan keuangan daerah dengan harapan bahwa setiap pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah dapat memahami dan mengimplementasikan SIPD secara mandiri serta membangun hubungan koordinasi dengan Pusat Data Teknologi Informasi Kementerian Dalam Negeri yang bertujuan untuk memastikan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung berjalan sesuai dengan regulasi dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

3.4 Diskusi Temuan Utama

Penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur belum dapat dikatakan efektif. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Vitriana & Ahyaruddin yang menemukan bahwa Penggunaan SIPD di BPKAD Kota Pekanbaru dalam pengelolaan keuangan daerah belum efektif (Vitriana et al., 2022). Kedua penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat sosialisasi yang dilakukan oleh BPKAD. Akan tetapi, pada faktanya pemahaman dalam penggunaan sistem ini masih kurang, tidak semua pegawai yang memahami sistem ini.

Layaknya pada penerapan aplikasi pemerintahan lainnya, SIPD juga masih memiliki permasalahan dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Salah satunya yaitu permasalahan sumber daya manusia yang belum dapat dikatakan baik karena masih terbatas yang mampu mengaplikasikan SIPD ini, layaknya temuan Adisi & Sadad (Adisi & Sadad, 2022). Permasalahan lain yang terjadi pada penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah terletak pada belum optimalnya pelatihan SIPD dari pemerintah pusat, server yang error dan permasalahan lain terkait dengan pengelolaan keuangan. Temuan ini memperkuat temuan penelitian dari Tumija et. al, karena meskipun implementasi SIPD dalam pengelolaan keuangan Daerah di Kota Semarang, sudah terlaksana, namun ada beberapa hambatan dalam penerapannya (Tumija et al., 2023).

Penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur belum dapat dikatakan efektif ini berbeda dengan temuan sebelumnya pada penelitian yang dilakukan oleh Manoe et. al. Pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) khususnya bidang anggaran efektif diterapkan dalam pelaksanaan, perencanaan, pengelolaan anggaran (Manoe et al., 2023). Penelitian lain yang juga menunjukkan penerapan yang efektif terhadap penerapan SIPD

yaitu penelitian yang dilakukan oleh Balqis & Fadhly (Balqis & Fadhly, 2021). Tentu saja hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah(SIPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(BPKAD) Kabupaten Tulungagung belum dikatakan efektif. Terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah(SIPD) ini belum efektif diantaranya penerapan SIPD ini belum sepenuhnya diterapkan pada tahap penatausahaan dan akuntansi pelaporan, Pusdatin Kemendagri kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia minim dilakukan serta sistem yang sering mengalami *error*.
2. Faktor hambatan dalam menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah(SIPD) adalah tujuan pemerintah pusat menerapkan *one system* pada proses pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD masih sering mengalami kendala. Hambatan kedua yaitu kurangnya sosialisasi Pusdatin Kemendagri kepada daerah, Minimnya jumlah tenaga ahli yang mampu menggunakan SIPD, serta kurangnya penyelesaian tindak lanjut dari pemerintah pusat terkait kendala yang muncul dalam penerapan SIPD.
3. Upaya dalam mengatasi berbagai hambatan dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah(SIPD), yaitu pemerintah pusat memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah, meningkatkan sosialisasi oleh Pusdatin Kemendagri, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta memberikan fasilitas bernama klinik akuntansi sebagai sarana dalam melayani OPD lain jika mengalami hambatan dalam penerapan SIPD.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga terbatas dalam hal wawancara kepada informan yakni Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(BPKAD) Kabupaten Tulungagung dikarenakan beliau belum berkenan memberikan waktu untuk melakukan wawancara pada saat peneliti melakukan proses penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian ini, sehingga peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan topik yang sama yakni penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan pada Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada seluruh pegawai BPKAD Kabupaten Tulungagung yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adisi, C. A., & Sadad, A. (2022). Efektivitas program sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) pada Kantor BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu. *Ejurnal.Politeknikpratama.Ac.Id*, 1(3), 150–164. <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/view/581>
- Balqis, N., & Fadhly, Z. (2021). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distranaker) Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Public Policy*, 7(2), 117. <https://doi.org/10.35308/JPP.V7I2.4246>
- Creswell, J. W. (2013). *Reseach Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Belajar.
- Hartono, L. B., Affandi, A., & Suwanda, D. (2023). Strategi Pengelolaan Modal Kerja untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah (Studi Kasus pada RSUD BLUD di Wilayah Purwasuka Jawa Barat). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2), 1477–1489. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.1543>
- Hong, S., & Choi, M. (2018). Factors Influencing The Adoption of E-Government Services Among Baby Boomers and Older Adults. *Innovation in Aging*, 2(suppl_1), 672. <https://doi.org/10.1093/geroni/igy023.2502>
- Luo, C., Wei, D., Su, W., & Lu, J. (2023). Association between Regional Digitalization and High-Quality Economic Development. *Sustainability (Switzerland)*, 15(3). <https://doi.org/10.3390/SU15031909>
- Manoe, D. S., Koten, Y., & Rozady, M. P. (2023). Analisis Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Bidang Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab.Sikka. *Increate - Inovasi Dan Kreasi Teknologi*, 9(1). <https://jurnal.nusanipa.ac.id/index.php/increate/article/view/357>
- Muqoyyidin, A. W. (2016). Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 287. <https://doi.org/10.31078/JK1025>
- Pentoria, R., Vaguaita, M., & Meilina, S. (2023). Management of Regional Revenue and Expenditure Budgets at the Regional Financial Management Agency. *Journal Of Public Administration And Business*, 10(1), 33.
- Steers, R. M. (2020). *Efektivitas Organisasi*. Erlangga.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Talitha, T., Firman, T., & Hudalah, D. (2020). Welcoming two decades of decentralization in Indonesia: a regional development perspective. *Territory, Politics, Governance*, 8(5), 690–708. <https://doi.org/10.1080/21622671.2019.1601595;SUBPAGE:STRING:ACCESS>
- Tumija, T., Hendra, A., & Sinurat, M. (2023). Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang. *Jurnal Media Birokrasi*, 5(1), 79–91. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMB/article/view/3389>
- Tumija, T., & Rachmadika, F. (2024). Efektivitas Pemindahtanganan Aset Peralatan dan Mesin melalui Penjualan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 11, 93–111. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/4762>
- Vitriana, N., Agustiawan, A., & Ahyaruddin, M. (2022). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru. *Digital Business Journal*, 1(1), 64. [DFhttps://doi.org/10.31000/DIGIBIS.V1I1.6947+VITRIANA,+N.,+](https://doi.org/10.31000/DIGIBIS.V1I1.6947+VITRIANA,+N.,+)